



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek KTL Rawan Kelebihan Bayar

**Ummi: Blacklistnya
Tunggu Inspektorat**

PELABAI - Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tetap mengang-garkan pembayaran proyek sarana penunjang Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) tahun 2018 yang diusul masuk daftar hitam (blacklist). Nilai yang akan dibayarkan mencapai Rp 576 juta dari pagu kontrak senilai Rp 1,1 miliar.

Sementara itu, di awal pengerjaan CV. Najwa Kon-struksi selaku rekanan pe-nyedia telah melakukan pen-cairan 20 persen dari pagu kontrak sebagai uang muka. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pe-nataan Ruang dan Perhubun-gan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, Ferdinan Agustian, ST melalui Kepala Bidang Perhubungan, Ummi Haidar Rambe, ST, M.Si mengaku, dana itu untuk pembayaran progres fisik yang memang belum dibayarkan. Tunda bayar itu akibat defisit ang-garan dalam struktur APBD Perubahan Kabupaten Lebong 2018.

"Selain uang muka, kami tidak pernah mengeluarkan re-komendasi pembayaran progres pekerjaan fisiknya," ujar Ummi kepada RB, kemarin (11/4).

Namun nilai yang akan diba-yarkan belum tentu sejumlah yang telah dianggarkan dalam APBD tahun ini. Besaran nilai hasil pekerjaan yang dibayar-kan tetap mengacu kepada hasil audityang akan dilakukan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai usulan Perhubun-gan. Sesuai hasil penghitun-gan kasar Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan tim pengawas, progres pekerjaan fisik hingga kontrak diputus Desember 2018 baru sebatas 37,4 persen. "Itu penghitungan kami, bisa jadi hasil BPK nanti jauh di bawah itu.

Terkait sanksi blacklist, Ummi mengaku pihaknya masih menunggu rekomen-dasi dari Inspektorat Kabupat-en Lebong. Namun seluruh dokumen kontrak berikut has-il hasil pemeriksaan lapangan dan berita acara pemu-tusan kontrak telah disampaikannya ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Akan kami koordinasikan ke Ins-pektorat. Soalnya untuk dua pekerjaan fisik di Bidang Bina Marga yang putus kontrak telah ditayangkan blacklistnya di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik, red)," tutur Ummi.

Terpisah, Anas Umbara selaku PPTK mengaku penghitungan baru seba-tas ke persentase pekerjaan. Pihaknya tidak menghitung soal kualitas pekerjaan. Tidak dipungkirinya, beberapa vol-ume pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Diantaranya uku-ran halte yang tidak sesuai kontrak karena bagian atap-nya sempat dipotong lantaran menjorok ke badan jalan. "Memang seharusnya titik nol halte itu dibangun lebih mundur agar ujung atapnya tidak masuk ke badan jalan," tandas Anas. (sca)